



RENCANA KERJA (RENJA)



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Tengah dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini. Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026.

Untuk mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, terjadinya peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat Kebijakan dan Program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan Anggaran Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Melalui Rencana Kerja, diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institut pemerintah maupun mitra kerja.

Palu,

2022

Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
Pembina Tingkat. I
NIP. 19670727 198603 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penyusunan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat	6
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD.....	18
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	19
2.4 Review terhadap Rancangan Awal OPD	20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.....	27
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	29
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	34
3.3 Program dan Kegiatan.....	35
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	52
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	55
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB V PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)*	7
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019-2020 dan Prakiraan 2021-2022	18
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022	39
Tabel 2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	27
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Tengah	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah langkah awal dalam menjalankan suatu organisasi, dimana perencanaan berfungsi membantu para pengambil kebijakan dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai terutama untuk menyusun strategi dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dilakukan sebagai cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan, sebagai cara untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan, meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan terutama untuk memperkecil pemborosan dan meminimalisir tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Serta perencanaan dilakukan dalam rangka menetapkan standar yang akan dipakai untuk mempermudah pengawasan.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Selain itu, Rencana kerja Perangkat Daerah juga memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berpedoman

pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan bersifat indikatif. Keterkaitan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Rencana Kerja Bapenda harus mendukung dalam mewujudkan visi pembangunan Sulawesi Tengah Tahun 2022 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.2 Landasan Hukum

Dalam melaksanakan seluruh kegiatannya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah senantiasa mengacu kepada peraturan Perundang-undangan atau landasan hukum yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);
 9. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (lembaran daerah provinsi sulawesi tengah tahun 2016 nomor 88, tambahan lembaran daerah provinsi sulawesi tengah nomor 74);
 10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi;

11. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi pimpinan dan staf BAPENDA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan dalam pengelolaan pendapatan daerah;
2. Kerangka dasar bagi BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah;
3. Memudahkan aparatur BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun menyampaikan Laporan Kinerja BAPENDA atas pelaksanaan program dan kegiatan secara terarah, terukur, dan bertanggungjawab.

Adapun tujuan disusunnya Renja BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 adalah:

1. Meningkatkan Perencanaan Pengelolaan Pendapatan daerah dengan memberikan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis, berkelanjutan dan akuntabel;
2. Tersusunnya rencana program dan kegiatan yang berbasis pengendalian, monitoring dan evaluasi, berorientasi pada hasil dengan indikator terukur yang telah ditetapkan;
3. Menyatukan persepsi, sikap dan pandangan serta komitmen antara pimpinan dan staf dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 tersusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan dengan anggaran belanja sebesar Rp. 72.904.214.122,58 dengan rincian belanja tidak langsung Rp. 43.928.116.787,58 dan belanja langsung Rp. 28.976.097.335,00. Anggaran belanja yang terealisasi pada tahun 2020 sebesar Rp. 68.250.427.660,64 atau 93,62% dari nilai yang dianggarkan.

Selisih Lebih Anggaran (SILPA) pada tahun 2020 sebesar Rp. 4.653.786.461,94 atau 6,38% yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.634.490.138,58 dan belanja langsung sebesar Rp. 3.019.296.323,36. Adapun hal-hal yang menyebabkan SILPA yaitu :

1. Sisa gaji untuk kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, tunjangan tambahan penghasilan dan adanya ASN yang telah pensiun/meninggal dunia
2. Selisih biaya hotel, transportasi dan lumpsum perjalanan dinas dalam dan luar daerah
3. Pengalokasian belanja yang tidak terukur pada belanja jasa kantor seperti listrik, telpon dan lainnya
4. Sisa kontrak, negosiasi harga barang, penawaran pihak pelaksana pekerjaan dan penawaran pihak penyedia jasa pengadaan
5. Adanya potongan absensi pada belanja honorarium ASN dan Non ASN

Adapun Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Badan Pendapatan s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)* adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)*
Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2019)		Ket
					Target Renja PD tahun n-2	Realisasi Renja tahun n-2	Tingkat Realisasi (t-n)			Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					2019	2020	2020			2021	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12 = 11/4	13
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan:	Tingkat layanan Administrasi Perkantoran		70%	75%	75%	100%					
	1 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya Jasa pelayanan Perkantoran		70%	75%	75%	100%					
	2 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran		70%	75%	75%	100%					
	3 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		70%	75%	75%	100%					
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ketersediaan sarana dan Prasarana Aparatur		75%	80%	80%	100%					
	1 Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur		75%	80%	80%	100%					
	2 Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur operasional SKPD	Terpeliharanya sarana dan Prasarana Aparatur Operasional SKPD		75%	80%	80%	100%					
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Sumberdaya Aparatur yang berkualitas		70%	75%	75%	100%					
	1 Pengelolaan Kepegawaian	Terselenggaranya Pengelolaan Kepegawaian		70%	75%	75%	100%					
	2 Peningkatan Sumberdaya Aparatur	Tersedianya Sumberdaya Aparatur yg berkualitas		70%	75%	75%	100%					
	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan dan Asset berbasis Akrua		Laporan	Laporan	Laporan	Laporan					
	1 Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Revaluasi/ Appraisal Asset/ Barang SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan dan Asset		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%					

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12 = 11/4	13
	Program Evaluasi dan Perencanaan Penganggaran	Terlaksananya Evaluasi Program dan Perencanaan Anggaran		Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen					
	1 Penyusunan Rencana Anggaran dan Evaluasi Laporan Program/Kegiatan SKPD	Tersusunnya Program/Kegiatan dan Anggaran SKPD		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%					
	Program Pengelolaan Pajak Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah		Target Pajak Daerah	Target Pajak Daerah	Target Pajak Daerah	Target Pajak Daerah					
	1 Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah	Terlaksananya pengelolaan Pajak daerah		Target Pajak Daerah	Target Pajak Daerah	Target Pajak Daerah	Target Pajak Daerah					
	2 Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah	Terselenggaranya Penetapan dan Keberatan Pajak		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%					
	3 Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah	Tersedianya Laporan Pajak Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%					
	Program Retribusi, Dana Bagi Hasil Pusat dan Pendapatan Lain-Lain	Meningkatkan Retribusi Daerah, DBH Pusat dan PLL		Target Retribusi, PLL	Target Retribusi, PLL	Target Retribusi, PLL	Target Retribusi, PLL					
	1 Pengelolaan Retribusi dan PLL	Terealisirnya Penerimaan Retribusi dan PLL		Target Retribusi, PLL	Target Retribusi, PLL	Target Retribusi, PLL	Target Retribusi, PLL					
	2 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pusat	Terealisirnya Penerimaan dana Bagi Hasil Pusat		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%					
	3 Pengelolaan Pembukuan dan Pelaporan Retribusi dan PLL	Tersedianya Laporan Retribusi Daerah dan PLL		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%					
	Program Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan	Terselenggaranya Pengawasan dan pembinaan pengelolaan pendapatan asset, keuangan dan personil		Laporan	Laporan	Laporan	Laporan					
	1 Pengawasan Keuangan, Asset dan Personil Pengelolaan Pajak dan Retribusi	Terlaksananya pengawasan keuangan, asset dan personil		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%					
	2 Pembinaan Teknis Administrasi dan Pengelolaan Pendapatan	Terlaksananya pembinaan pengelolaan pendapatan daerah		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%					
	3 Pengelolaan Penerbitan dan Penegakkan Hukum	Terlaksananya penerbitan dan penegakkan Hukum		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%					

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12 = 11/4	13
	Program Pengembangan Pendapatan Sistem Informasi dan Pengolahan Data	Terselenggaranya Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi, dan Pengolahan Data		Laporan	Laporan	Laporan	Laporan					
	1 Pengembangan dan Penetapan Pendapatan	Tersedianya Data Sumber Pendapatan		1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%					
	2 Sistem Informasi dan pengolahan Data	Tersedianya Informasi dan Laporan Pendapatan Daerah		1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%					
	3 Hukum dan Perundang-undangan	Tersedianya Produk Hukum sesuai Perundang-undangan		1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%					
	UPTB WIL. I PALU											
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah		Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB					
	1 Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB					
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
	1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur		75%	80%	80%	100%					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	1 Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran		75%	80%	80%	100%					
	2 Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran		75%	80%	80%	100%					
	UPTB WIL. II PARIMO											
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah		Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB					
	1 Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB					
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
	1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur		75%	80%	80%	100%					

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12 = 11/4	13
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	1 Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran		75%	80%	80%	100%					
	2 Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran		75%	80%	80%	100%					
	UPTB WIL. III POSO											
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah		Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB					
	1 Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB					
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
	1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur		75%	80%	80%	100%					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	1 Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran		75%	80%	80%	100%					
	2 Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran		75%	80%	80%	100%					
	UPTB WIL. IV MOROWALI											
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah		Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB					
	1 Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB					
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
	1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur		75%	80%	80%	100%					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	1 Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran		75%	80%	80%	100%					
	2 Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran		75%	80%	80%	100%					

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12 = 11/4	13
	UPTB WIL. V BANGGAI											
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah		Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB					
	1 Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB					
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
	1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur		75%	80%	80%	100%					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	1 Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhi Jasa Pelayanan Perkantoran		75%	80%	80%	100%					
	2 Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhi Jasa Administrasi Perkantoran		75%	80%	80%	100%					
	UPTB WIL. VI BANGKEP											
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah		Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB					
	1 Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB					
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
	1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur		75%	80%	80%	100%					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	1 Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhi Jasa Pelayanan Perkantoran		75%	80%	80%	100%					
	2 Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhi Jasa Administrasi Perkantoran		75%	80%	80%	100%					

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=5+7+10	12=11/4	13
	UPTB WIL. VII TOLITOLI											
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah		Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB					
	1 Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB					
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
	1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur		75%	80%	80%	100%					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	1 Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhiya Jasa Pelayanan Perkantoran		75%	80%	80%	100%					
	2 Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhiya Jasa Administrasi Perkantoran		75%	80%	80%	100%					
	UPTB WIL. VIII BUOL											
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah		Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB					
	1 Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB					
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
	1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur		75%	80%	80%	100%					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	1 Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhiya Jasa Pelayanan Perkantoran		75%	80%	80%	100%					
	2 Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhiya Jasa Administrasi Perkantoran		75%	80%	80%	100%					
	UPTB WIL. IX TOUNA											
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah		Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB					
	1 Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB					

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=5+7+10	12=11/4	13
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
	1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur		75%	80%	80%	100%					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	1 Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran		75%	80%	80%	100%					
	2 Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran		75%	80%	80%	100%					
	UPTB WIL. X DONGGALA											
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah		Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB					
	1 Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB					
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
	1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur		75%	80%	80%	100%					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	1 Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran		75%	80%	80%	100%					
	2 Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran		75%	80%	80%	100%					
	UPTB WIL. XI SIGI											
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah		Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB					
	1 Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB	Target PKB BBN-KB					
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
	1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur		75%	80%	80%	100%					

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=5+7+10	12=11/4	13
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	1 Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran		75%	80%	80%	100%					
	2 Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran		75%	80%	80%	100%					
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan	30,47 %					28,34 %	27,32 %	27,32 %	89,66	
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengelolaan Pendapatan	100,00 %					100,00 %	50,99 %	50,99 %	50,99	
5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	9 Dokumen					9 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	44,44	
5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	18 Dokumen					18 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	44,44	
5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Dokumen					1 Dokumen	Dokumen	- Laporan	0,00	
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	16 Dokumen					16 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	37,50	
5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	16 Dokumen					16 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	50,00	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	11 Dokumen					11 Dokumen	Dokumen	- Dokumen	0,00	
	~ UPT WII I Palu		1 Dokumen					1 Dokumen	Dokumen	- Dokumen	0,00	
	~ UPT WII II Parimo		1 Dokumen					1 Dokumen	Dokumen	- Dokumen	0,00	
	~ UPT WII III Poso		1 Dokumen					1 Dokumen	Dokumen	- Dokumen	0,00	
	~ UPT WII IV Morowali		1 Dokumen					1 Dokumen	Dokumen	- Dokumen	0,00	
	~ UPT WII V Banggai		1 Dokumen					1 Dokumen	Dokumen	- Dokumen	0,00	
	~ UPT WII VI Bangkep		1 Dokumen					1 Dokumen	Dokumen	- Dokumen	0,00	
	~ UPT WII VII Tolitoli		1 Dokumen					1 Dokumen	Dokumen	- Dokumen	0,00	
	~ UPT WII VIII Buol		1 Dokumen					1 Dokumen	Dokumen	- Dokumen	0,00	
	~ UPT WII IX Touna		1 Dokumen					1 Dokumen	Dokumen	- Dokumen	0,00	
	~ UPT WII X Donggala		1 Dokumen					1 Dokumen	Dokumen	- Dokumen	0,00	
	~ UPT WII XI Sigi		1 Dokumen					1 Dokumen	Dokumen	- Dokumen	0,00	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak	Jumlah Dokumen hasil pengawasan	1 Dokumen					1 Dokumen	Dokumen	- Dokumen	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=5+7+10	12=11/4	13
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah										
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah										
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen					3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	33,33	
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan					1 Laporan	Laporan	- Laporan	0,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan										
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	270 Org/bln					270 Org/bln	270 Org/bln	270 Laporan	100,00	
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan										
5.02.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen					2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50,00	
5.02.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen					2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50,00	
5.02.01.1.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	4 Laporan					4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	50,00	
5.02.01.1.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	2 Laporan					2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan										
5.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	1 Dokumen					1 Dokumen	Dokumen	- Dokumen	0,00	
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Org					3 Org	1 Org	1 Org	33,33	
5.02.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang					50 Orang	25 Org	25 Org	50,00	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11= 5+7+10	12= 11/4	13
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian										
		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa										
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	44 Paket					42 Paket	17 Paket	17 Paket	38,64	
	~ Badan Pendapatan Daerah		6 Paket					6 Paket	3 Paket	3 Paket	50,00	
	~ UPT Wli I Palu		3 Paket					3 Paket	1 Paket	1 Paket	33,33	
	~ UPT Wli II Parimo		3 Paket					3 Paket	1 Paket	1 Paket	33,33	
	~ UPT Wli III Poso		5 Paket					5 Paket	2 Paket	2 Paket	40,00	
	~ UPT Wli IV Morowali		3 Paket					3 Paket	1 Paket	1 Paket	33,33	
	~ UPT Wli V Banggai		2 Paket					2 Paket	1 Paket	1 Paket	50,00	
	~ UPT Wli VI Bangkep		3 Paket					3 Paket	1 Paket	1 Paket	33,33	
	~ UPT Wli VII Tolitoli		4 Paket					4 Paket	2 Paket	2 Paket	50,00	
	~ UPT Wli VIII Buol		3 Paket					3 Paket	1 Paket	1 Paket	33,33	
	~ UPT Wli IX Touna		5 Paket					3 Paket	1 Paket	1 Paket	20,00	
	~ UPT Wli X Donggala		3 Paket					3 Paket	1 Paket	1 Paket	33,33	
	~ UPT Wli XI Sigi		4 Paket					4 Paket	2 Paket	2 Paket	50,00	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket					7 Paket	3 Paket	3 Paket	42,86	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan					4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	50,00	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian										
5.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit					1 Unit	Unit	- Unit	0,00	
5.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Paket					9 Paket	5 Paket	5 Paket	55,56	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian										
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Laporan					11 Laporan	Laporan	- Laporan	0,00	
	~ Badan Pendapatan Daerah		1 Laporan					1 Laporan	Laporan	- Laporan	0,00	
	~ UPT Wli I Palu		1 Laporan					1 Laporan	Laporan	- Laporan	0,00	
	~ UPT Wli II Parimo		1 Laporan					1 Laporan	Laporan	- Laporan	0,00	
	~ UPT Wli III Poso		1 Laporan					1 Laporan	Laporan	- Laporan	0,00	
	~ UPT Wli IV Morowali		1 Laporan					1 Laporan	Laporan	- Laporan	0,00	
	~ UPT Wli V Banggai		1 Laporan					1 Laporan	Laporan	- Laporan	0,00	
	~ UPT Wli VI Bangkep		1 Laporan					1 Laporan	Laporan	- Laporan	0,00	
	~ UPT Wli VII Tolitoli											
	~ UPT Wli VIII Buol		1 Laporan					1 Laporan	Laporan	- Laporan	0,00	
	~ UPT Wli IX Touna		1 Laporan					1 Laporan	Laporan	- Laporan	0,00	
	~ UPT Wli X Donggala		1 Laporan					1 Laporan	Laporan	- Laporan	0,00	
	~ UPT Wli XI Sigi		1 Laporan					1 Laporan	Laporan	- Laporan	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11= 5+7+10	12= 11/4	13
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian										
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Paket					2 Paket	Paket	- Paket	0,00	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	49 Paket					49 Paket	25 Paket	25 Paket	51,02	
	- Badan Pendapatan Daerah		4 Paket					4 Paket	2 Paket	2 Paket	50,00	
	- UPT WII I Palu		3 Paket					2 Paket	1 Paket	1 Paket	33,33	
	- UPT WII II Parimo		5 Paket					5 Paket	2 Paket	2 Paket	40,00	
	- UPT WII III Poso		6 Paket					6 Paket	3 Paket	3 Paket	50,00	
	- UPT WII IV Morowali		6 Paket					6 Paket	3 Paket	3 Paket	50,00	
	- UPT WII V Banggai		1 Paket					1 Paket	Paket	- Paket	0,00	
	- UPT WII VI Bangkep		1 Paket					1 Paket	Paket	- Paket	0,00	
	- UPT WII VII Tolitoli		5 Paket					5 Paket	3 Paket	3 Paket	60,00	
	- UPT WII VIII Buol		5 Paket					5 Paket	3 Paket	3 Paket	60,00	
	- UPT WII IX Touna		5 Paket					5 Paket	3 Paket	3 Paket	60,00	
	- UPT WII X Donggala		4 Paket					5 Paket	3 Paket	3 Paket	75,00	
	- UPT WII XI Sigi		4 Paket					4 Paket	2 Paket	2 Paket	50,00	
5.02.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset tetap lainnya yang dipelihara	2 Paket					2 Paket	1 Paket	1 Paket	50,00	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kanbr dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan	9 Paket					10 Paket	4 Paket	4 Paket	44,44	
	- Badan Pendapatan Daerah		Paket									
	- UPT WII I Palu		4 Paket					4 Paket	2 Paket	2 Paket	50,00	
	- UPT WII II Parimo											
	- UPT WII III Poso											
	- UPT WII IV Morowali											
	- UPT WII V Banggai		2 Paket					2 Paket	1 Paket	1 Paket	50,00	
	- UPT WII VI Bangkep											
	- UPT WII VII Tolitoli											
	- UPT WII VIII Buol							1 Paket	Paket	- Paket		
	- UPT WII IX Touna									- Paket		
	- UPT WII X Donggala		2 Paket					2 Paket	1 Paket	1 Paket	50,00	
	- UPT WII XI Sigi		1 Paket					1 Paket	Paket	- Paket	0,00	

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sesuai table berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2019-2020 dan Prakiraan 2021-2022

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun				Tahun		Tahun		
				2020	2021	2022	2023	2020	2021*	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Target PAD			1.054,60 Milyar				1.122,77 Milyar				
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan				28,34	30,47	30,57	26,77	27,32	30,47	30,57	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Isu-isu Tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- 1) Pendapatan Asli Daerah masih bertumpu pada Pajak Daerah
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan asset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi.
- 3) Dana Perimbangan yang masih bersifat given dari pemerintah pusat
- 4) Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan pemerintah pusat
- 5) Masih diperlukan cara penentuan potensi pendapatan daerah yang lebih tepat sesuai dengan kondisi yang ada untuk 5 tahun kedepan
- 6) Dalam Pengelolaan dan Optimalisasi asset masih diperlukan tenaga yang kompeten di bidang penilaian asset untuk penyusunan neraca guna percepatan laporan keuangan secara keseluruhan

2.3.2 Rekomendasi dan Catatan Strategis

- 1) Peningkatan PAD dari sisi pajak dilakukan dengan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dengan system online, pelayanan dengan bus Samsat Keliling, partisipasi pada kegiatan yang diadakan Pemda Kabupaten/Kota, Pelayanan Samsat Corner atau Outlet:
 - Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota
 - Pembebanan BBN-KB II dan pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga
 - Peningkatan kemampuan aparatur pajak daerah dan retribusi daerah melalui kegiatan bimtek pajak dan retribusi daerah
 - Koordinasi dalam rangka optimalisasi pendapatan untuk memecahkan masalah pengelolaan pendapatan di masing-masing UPTB
 - Forum komunikasi antara pemerintah provinsi Sulawesi Tengah dengan dealer dalam upaya peningkatan sumbangan pihak ketiga

- Forum komunikasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah dalam upaya peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Peningkatan Optimalisasi / pemanfaatan asset pemerintah daerah sebagai sumber PAD
- 3) Dilaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga (Untad) untuk kajian potensi Pendapatan Daerah
- 4) Meningkatkan Pemahaman SDM melalui Bimtek

2.4 Review terhadap Rancangan Awal OPD

Adapun perbandingan antara RKPD 2022 dengan rancangan awal usulan Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah sesuai table sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

Perangkat Daerah :Badan Pendapatan Daerah
Periode / Tahun : 2022

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
BADAN		PROV.SULTENG			
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah		
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan		
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	270 Org/bln	
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan		
5.02.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	
5.02.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	
5.02.01.1.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	4 Laporan	
5.02.01.1.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	2 Laporan	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
5.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Org	
5.02.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
			Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
5.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	
5.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Paket	

1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
			Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Paket	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Paket	
5.02.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset tetap lainnya yang dipelihara	2 Paket	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase PAD terhadap Pendapatan	#### %	
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengelolaan Pendapatan	100 %	
5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	9 Dokumen	
5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	18 Dokumen	
5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Dokumen	
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	16 Dokumen	
5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	16 Dokumen	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen hasil pengawasan	1 Dokumen	
UPT Wilayah I Palu		Kota Palu			
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
			Jumlah laporan Penyediaan Barang dan Jasa		
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
			Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 Paket	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah paket pemeliharaan	4 Paket	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah				
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen	

1	2	3	4	5	6
UPT Wilayah II Parimo		Kab. Parimo			
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
			Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
			Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Paket	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah				
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen	
UPT Wilayah III Poso		Kab. Poso			
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
			Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
			Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Paket	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah				
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Laporan	
UPT Wilayah IV Morowali		Kab. Morowali & Kab. Morowali Utara			
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
			Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	

1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
			Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Paket	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah				
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen	
UPT Wilayah V Banggai		Kab. Banggai			
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
			Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
			Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Paket	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah paket pemeliharaan	2 Paket	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah				
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen	
UPT Wilayah VI Bangkep		Kab. Bangkep dan Kab Banggai Laut			
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
			Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	

1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
			Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Paket	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah				
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen	
UPT Wilayah VII Toli-toli		Kab. Toli-Toli			
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
			Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
			Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Paket	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah paket pemeliharaan	0 Paket	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah				
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen	
UPT Wilayah VIII BUOL		Kab. Buol			
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
			Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
			Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Paket	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah paket pemeliharaan	Paket	

1	2	3	4	5	6
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah				
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen	
UPT Wilayah IX Tojo Una-una		Kab. Tojo Una-una			
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
			Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
			Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Paket	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah paket pemeliharaan		
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah				
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen	
UPT Wilayah X Donggala		Kab. Donggala			
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
			Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
			Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Paket	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah paket pemeliharaan	2 Paket	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah				
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen	

1	2	3	4	5	6
UPT Wilayah XI Sigi		Kab. Sigi			
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
			Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
			Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Paket	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah paket pemeliharaan	1 Paket	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah				
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

I. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022, dimana terdapat 2 Program dan 21 Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan:

- Pengelolaan Pendapatan Daerah

II. Rencana Kerja 11 Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022, dimana terdapat 2 Program dan 4 Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan:

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan:

- Pengelolaan Pendapatan Daerah

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tabel 5
Identifikasi Kebijakan Nasional
Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 84 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1.) Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris merupakan unsur yang membantu dan bertanggung jawab kepada kepala Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis program, kepegawaian dan umum serta keuangan dan asset kepada semua unsur dilingkungan kerja dan unit kerja terkait pada Badan Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Merencanakan kebijakan teknis, perencanaan dan evaluasi program, pengelolaan dan pelayanan administrasi perlengkapan dan

- umum, kepegawaian, keuangan dan aset guna kelancaran tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
- b. Mendistribusikan tugas dan petunjuk atas perencanaan dan evaluasi program, pengelolaan dan pelayanan administrasi perlengkapan dan umum, kepegawaian, keuangan dan aset guna kelancaran tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
 - c. Menyelenggarakan teknis operasional perencanaan dan evaluasi program, pengelolaan dan pelayanan administrasi perlengkapan dan umum, kepegawaian, keuangan dan aset guna kelancaran tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
 - d. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, pengelolaan dan pelayanan administrasi perlengkapan dan umum, kepegawaian, keuangan dan aset guna kelancaran tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
 - e. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan administrasi perlengkapan dan umum, kepegawaian, keuangan dan aset guna kelancaran tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

2.) Bidang Pengembangan, Sistem Informasi, dan Pengolahan Data

Bidang Pengembangan, Sistem Informasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang Pengembangan dan Penetapan Pendapatan, Sistem Informasi dan Pengolahan Data serta Hukum dan Perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan tugas, Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Pengolahan Data mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Pengembangan dan Penetapan Pendapatan,

- Sistem Informasi dan Pengolahan Data serta Hukum dan Perundang-undangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan dan Penetapan Pendapatan, Sistem Informasi dan Pengolahan Data serta Hukum dan Perundang-undangan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, bimbingan teknis di bidang Pengembangan dan Penetapan Pendapatan, Sistem Informasi dan Pengolahan Data serta Hukum dan Perundang-undangan
 - d. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan bidang Pengembangan dan Penetapan Pendapatan, Sistem Informasi dan Pengolahan Data serta Hukum dan Perundang-undangan;
 - e. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang Pengembangan dan Penetapan Pendapatan, Sistem Informasi dan Pengolahan Data serta Hukum dan Perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
 - g. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Pengolahan Data.

3.) Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan penerimaan pajak daerah, Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah, Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas, Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di bidang Pajak Daerah, Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah, dan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah;

- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di bidang Pajak Daerah, Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah, dan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan di bidang Pajak Daerah, Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah, dan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah;
- d. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di bidang Pajak Daerah, Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah, dan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis di bidang Pajak Daerah, Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah, dan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah;
- f. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang Pajak Daerah, Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah, dan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah;
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- h. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Pajak Daerah.

4.) Bidang Bukan Pajak dan Dana Bagi Hasil Pusat

Bidang Bukan Pajak dan Dana Bagi Hasil Pusat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Dana Bagi Hasil Pusat, Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain.

Dalam penyelenggaraan tugas, Bidang Bukan Pajak dan Dana Bagi Hasil Pusat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Dana Bagi Hasil Pusat, Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Dana Bagi Hasil Pusat, Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Dana Bagi Hasil Pusat, Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;
- d. Penyiapan bahan pengkoordinasian di Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Dana Bagi Hasil Pusat, Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain dengan pihak dan unit terkait;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis di Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Dana Bagi Hasil Pusat, Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;
- f. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Dana Bagi Hasil Pusat, Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;
- g. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- h. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Bukan Pajak dan Dana Bagi Hasil Pusat.

5.) Bidang Pengawasan dan Pembinaan

Bidang Pengawasan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pengawasan dan pembinaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang Pengawasan Keuangan, Asset dan Personil, Pembinaan Teknik Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Penertiban dan Penegakan Hukum.

Dalam penyelenggaraan Bidang Pengawasan dan Pembinaan, mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program teknis operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Pengawasan Keuangan, Aset dan Personil, Pembinaan Teknik Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Penertiban dan Penegakan Hukum;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengawasan Keuangan, Aset dan Personil, Pembinaan Teknik Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Penertiban dan Penegakan Hukum;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, bimbingan teknis di bidang Pengawasan Keuangan, Aset dan Personil, Pembinaan Teknik Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Penertiban dan Penegakan Hukum;
- d. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan Pengawasan Keuangan, Aset dan Personil, Pembinaan Teknik Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Penertiban dan Penegakan Hukum;
- e. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pengawasan Keuangan, Aset dan Personil, Pembinaan Teknik Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Penertiban dan Penegakan Hukum;
- f. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- g. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengawasan dan Pembinaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu terwujudnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan guna mendukung kemandirian fiskal daerah

Adapun sasaran Renja yaitu meningkatnya kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD

3.3 Program dan Kegiatan

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sesuai tabel berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Provinsi Sulawesi Tengah

Daerah :
Tahun : 2022
Maju : 2023

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.02.	KEUANGAN								
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	PROV.SULTENG		74.345.636.762	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			78.660.968.558
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah			2.677.659.538				1.388.614.737
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah		3 Dokumen	674.706.883				708.442.227
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	2.002.952.655				680.172.510
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan			55.382.286.276				55.509.240.266
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		270 Org/bln	55.382.286.276				55.509.240.266
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan			1.127.327.650				1.183.694.033
5.02.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		2 Dokumen	269.012.075				282.462.679
5.02.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah		2 Dokumen	232.416.550				244.037.378
5.02.01.1.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		4 Laporan	184.314.575				193.530.304
5.02.01.1.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		2 Laporan	441.584.450				463.663.673
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			1.331.511.900				1.398.087.495
5.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen	883.588.000				927.767.400
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		3 Org	103.510.000				108.685.500
5.02.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		50 Orang	344.413.900				361.634.595

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			2.407.967.690				5.576.746.304
		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa							-
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6 Paket	122.101.040				3.176.586.321
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan		7 Paket	1.518.795.275				1.594.735.039
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4 Laporan	767.071.375				805.424.944
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			6.637.301.073				5.066.203.893
5.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		3 Unit	977.766.000				1.026.654.300
5.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		9 Paket	5.659.535.073				4.039.549.593
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			3.278.214.201				6.251.003.960
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	3.278.214.201				6.251.003.960
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			1.503.368.434				2.287.377.871
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		2 Paket	31.701.400				33.286.470
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		4 Paket	712.400.000				1.456.861.015
5.02.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset tetap lainnya yang dipelihara		2 Paket	759.267.034				797.230.386
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan		30,47 %	2.925.449.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengelolaan Pendapatan		100 %	2.925.449.500				
5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		9 Dokumen	650.132.700				175.132.850
5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah		18 Dokumen	267.768.525				120.769.250
5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis		1 Dokumen	449.112.375				220.112.875
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		16 Dokumen	791.094.625				408.444.675
5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		16 Dokumen	198.836.950				152.212.812
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil pengawasan		1 Dokumen	568.504.325				250.304.325

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UPT Wilayah I Palu			Kota Palu						
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			1.511.359.920	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			1.005.219.900				
		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa							
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	1.005.219.900				1.055.480.895
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			380.920.720				
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	380.920.720				399.966.756
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			125.219.300				
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		3 Paket	41.060.000				43.113.000
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan		4 Paket	84.159.300				-
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				409.593.800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah				409.593.800				
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		1 Dokumen	409.593.800				300.444.400
UPT Wilayah II Parimo			Kab. Parimo						
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			939.495.900	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			108.170.725				
		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa							
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	108.170.725				113.579.261
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			735.735.175				
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	735.735.175				772.521.934
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			95.590.000				
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		5 Paket	95.590.000				100.369.500
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				195.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah				195.150.000				
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		1 Dokumen	195.150.000				189.050.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UPT Wilayah III Poso			Kab. Poso						
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			606.315.509	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			183.515.509				
		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa							
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	183.515.509				192.691.284
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			336.000.000				
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	336.000.000				352.800.000
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			86.800.000				
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		6 Paket	86.800.000				90.825.000
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				345.386.650	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah				345.386.650				
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		1 Laporan	345.386.650				210.132.900
UPT Wilayah IV Morowali			Kab. Morowali & Kab. Morowali Utara						
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			364.738.525	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			38.398.000				
		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa							
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	38.398.000				40.317.900
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			248.536.125				
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	248.536.125				260.962.931
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			77.804.400				
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		6 Paket	77.804.400				81.694.620
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				264.730.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah				264.730.000				
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		1 Dokumen	264.730.000				254.286.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UPT Wilayah V Banggai			Kab. Banggai						
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			802.665.475	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			125.307.600				
		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa							
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Paket	125.307.600				131.572.980
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			620.751.125				
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	620.751.125				651.788.681
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			56.606.750				
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		1 Paket	22.250.000				23.362.500
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan		2 Paket	34.356.750				-
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				429.687.100	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah				429.687.100				
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		1 Dokumen	429.687.100				250.908.675
									-
UPT Wilayah VI Bangkep			Kab. Bangkep dan Kab Banggai Laut						
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			310.140.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			26.539.100				
		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa							
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	26.539.100				27.866.055
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			251.401.400				
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	251.401.400				263.971.470
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			32.200.000				
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		1 Paket	32.200.000				33.810.000
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				283.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah				283.100.000				
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		1 Dokumen	283.100.000				130.420.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UPT Wilayah VII Toli-toli			Kab. Toli-Toli						
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			614.856.922	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			505.324.522				
		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa							
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	505.324.522				530.590.748
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			-				
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							279.675.000
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			109.532.400				
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		5 Paket	109.532.400				115.009.020
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan							-
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				385.557.350	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah				385.557.350				
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		1 Dokumen	385.557.350				235.166.300
UPT Wilayah VIII BUOL			Kab. Buol						
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			434.517.125	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			330.654.975				
		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa							
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	330.654.975				347.187.724
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			67.892.150				
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	67.892.150				71.286.758
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			35.970.000				
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		5 Paket	35.970.000				37.768.500
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan							-
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				261.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah				261.000.000				
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		1 Dokumen	261.000.000				131.249.750

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UPT Wilayah IX Tojo Una-una			Kab. Tojo Una-una						
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			388.713.935	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			84.813.935				
		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa							
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	84.813.935				89.054.632
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			226.800.000				
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	226.800.000				238.140.000
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			77.100.000				
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		5 Paket	77.100.000				80.955.000
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan							-
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				226.797.600	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah				226.797.600				
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		1 Dokumen	226.797.600				150.745.925
UPT Wilayah X Donggala			Kab. Donggala						
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			648.479.699	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			403.500.000				
		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa							
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	403.500.000				423.675.000
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			145.199.699				
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	145.199.699				152.459.684
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			99.780.000				
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		4 Paket	49.780.000				52.269.000
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan		2 Paket	50.000.000				-
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				153.146.905	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah				153.146.905				
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		1 Dokumen	153.146.905				151.734.825

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UPT Wilayah XI Sigi			Kab. Sigi						
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			1.007.859.825	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			91.775.000				
		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa							
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	91.775.000				96.363.750
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			593.072.825				
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	593.072.825				622.726.466
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			323.012.000				
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		4 Paket	47.000.000				49.350.000
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan		1 Paket	276.012.000				-
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				191.080.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah				191.080.000				
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		1 Dokumen	191.080.000				267.008.587

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2022, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah beserta 11 UPT Pendapatan Se-Sulteng akan melaksanakan program dan kegiatan seperti tercantum pada tabel berikut:

TABEL 4.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Periode 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022			
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan Tata Kelola Perangkat Daerah									
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		64,50	81.974.780.097		
		5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah			2.677.659.538		
		5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah		3 Dokumen	674.706.883	Sekretariat (Prog)	Provinsi
		5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	2.002.952.655	Sekretariat (Keu)	Provinsi
		5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan			55.382.286.276		
		5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		270 Org/bln	55.382.286.276	Sekretariat (Keu)	Provinsi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan			1.127.327.650		
		5.02.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		2 Dokumen	269.012.075	Bid. Non Pajak	Provinsi
		5.02.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah		2 Dokumen	232.416.550	Bid. Non Pajak	Provinsi
		5.02.01.1.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		4 Laporan	184.314.575	Bid. Wasbin	Provinsi
		5.02.01.1.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		2 Laporan	441.584.450	Bid. Non Pajak	Provinsi
		5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			1.331.511.900		
		5.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen	883.588.000	Sekretariat (Kepg)	Provinsi
		5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		3 Org	103.510.000	Sekretariat (Kepg)	Provinsi
		5.02.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		50 Orang	344.413.900	Bid. Pengembangan	Provinsi
		5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			5.311.186.956		
				Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa					
		5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6 Paket	3.025.320.306		
			~ Bapenda			6 Paket	122.101.040	Sekretariat	
			~ UPT Wil I Palu			3 Paket	1.005.219.900		Kota Palu
			~ UPT Wil II Parimo			3 Paket	108.170.725		Kab Parimo
			~ UPT Wil III Poso			5 Paket	183.515.509		Kab Poso
			~ UPT Wil IV Morowali			3 Paket	38.398.000		Kab Morowali & Morut

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			– UPT Wil V Banggai			2 Paket	125.307.600		Kab Banggai
			– UPT Wil VI Bangkep			3 Paket	26.539.100		Kab Bangkep & Banggai Laut
			– UPT Wil VII Tolitoli			4 Paket	505.324.522		Kab Tolitoli
			– UPT Wil VIII Buol			3 Paket	330.654.975		Kab Buol
			– UPT Wil IX Touna			5 Paket	84.813.935		Kab Touna
			– UPT Wil X Donggala			3 Paket	403.500.000		Kab Donggala
			– UPT Wil XI Sigi			4 Paket	91.775.000		Kab Sigi
		5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		7 Paket	1.518.795.275	Sekretariat	Provinsi
		5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4 Laporan	767.071.375	Sekretariat	Provinsi & Luar Daerah
		5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			6.637.301.073		
		5.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		3 Unit	977.766.000	Sekretariat	Provinsi
		5.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		9 Paket	5.659.535.073	Sekretariat	Provinsi
		5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			6.884.523.420		
		5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		11 Paket	6.884.523.420		
			– Bapenda			1 Laporan	3.278.214.201	Sekretariat	
			– UPT Wil I Palu			1 Laporan	380.920.720		Kota Palu
			– UPT Wil II Parimo			1 Laporan	735.735.175		Kab Parimo
			– UPT Wil III Poso			1 Laporan	336.000.000		Kab Poso
			– UPT Wil IV Morowali			1 Laporan	248.536.125		Kab Morowali & Morut
			– UPT Wil V Banggai			1 Laporan	620.751.125		Kab Banggai
			– UPT Wil VI Bangkep			1 Laporan	251.401.400		Kab Bangkep & Banggai Laut
			– UPT Wil VII Tolitoli						Kab Tolitoli
			– UPT Wil VIII Buol			1 Laporan	67.892.150		Kab Buol
			– UPT Wil IX Touna			1 Laporan	226.800.000		Kab Touna
			– UPT Wil X Donggala			1 Laporan	145.199.699		Kab Donggala
			– UPT Wil XI Sigi			1 Laporan	593.072.825		Kab Sigi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			2.622.983.284		
				Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
		5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		2 Paket	31.701.400	Sekretariat	
		5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		49 Paket	1.387.486.800		
			- Bapenda			4 Paket	712.400.000	Sekretariat	
			- UPT Wil I Palu			3 Paket	41.060.000		Kota Palu
			- UPT Wil II Parimo			5 Paket	95.590.000		Kab Parimo
			- UPT Wil III Poso			6 Paket	86.800.000		Kab Poso
			- UPT Wil IV Morowali			6 Paket	77.804.400		Kab Morowali & Morut
			- UPT Wil V Banggai			1 Paket	22.250.000		Kab Banggai
			- UPT Wil VI Bangkep			1 Paket	32.200.000		Kab Bangkep & Banggai Laut
			- UPT Wil VII Tolitoli			5 Paket	109.532.400		Kab Tolitoli
			- UPT Wil VIII Buol			5 Paket	35.970.000		Kab Buol
			- UPT Wil IX Touna			5 Paket	77.100.000		Kab Touna
			- UPT Wil X Donggala			4 Paket	49.780.000		Kab Donggala
			- UPT Wil XI Sigi			4 Paket	47.000.000		Kab Sigi
		5.02.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset tetap lainnya yang dipelihara		2 Paket	759.267.034	Sekretariat	
		5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan		9 Paket	444.528.050		
			- Bapenda			Paket			
			- UPT Wil I Palu			4 Paket	84.159.300		Kota Palu
			- UPT Wil II Parimo			Paket			Kab Parimo
			- UPT Wil III Poso			Paket			Kab Poso
			- UPT Wil IV Morowali			Paket			Kab Morowali &
			- UPT Wil V Banggai			2 Paket	34.356.750		Kab Banggai
			- UPT Wil VI Bangkep			Paket			Kab Bangkep &
			- UPT Wil VII Tolitoli			Paket			Kab Tolitoli
			- UPT Wil VIII Buol			Paket			Kab Buol
			- UPT Wil IX Touna			Paket			Kab Touna
			- UPT Wil X Donggala			2 Paket	50.000.000		Kab Donggala
			- UPT Wil XI Sigi			1 Paket	276.012.000		Kab Sigi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya Efisiensi dan efektifitas Pengelolaan keuangan guna mendukung Kemandirian Fiskal Daerah									
	Meningkatnya kemandirian Fiskal Daerah melalui optimalisasi PAD	5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan		30,47 %	6.070.678.905		
		5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengelolaan Pendapatan		100,00 %	6.070.678.905		
		5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		9 Dokumen	650.132.700	Bid. Pajak	Provinsi
		5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah		18 Dokumen	267.768.525	Bid. Pengembangan	Provinsi
		5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		1 Dokumen	449.112.375	Bid. Pengembangan	Provinsi
		5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		16 Dokumen	791.094.625	Bid. Pajak	Provinsi
		5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		16 Dokumen	198.836.950	Bid. Pajak	Provinsi
		5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		11 Dokumen	3.145.229.405		
			- UPT Wil I Palu			1 Dokumen	409.593.800		Kota Palu
			- UPT Wil II Parimo			1 Dokumen	195.150.000		Kab Parimo
			- UPT Wil III Poso			1 Laporan	345.386.650		Kab Poso
			- UPT Wil IV Morowali			1 Dokumen	264.730.000		Kab Morowali &
			- UPT Wil V Banggai			1 Dokumen	429.687.100		Kab Banggai
			- UPT Wil VI Bangkep			1 Dokumen	283.100.000		Kab Bangkep &
			- UPT Wil VII Tolitoli			1 Dokumen	385.557.350		Kab Tolitoli
			- UPT Wil VIII Buol			1 Dokumen	261.000.000		Kab Buol
			- UPT Wil IX Touna			1 Dokumen	226.797.600		Kab Touna
			- UPT Wil X Donggala			1 Dokumen	153.146.905		Kab Donggala
			- UPT Wil XI Sigi			1 Dokumen	191.080.000		Kab Sigi
		5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil pengawasan		1 Dokumen	568.504.325	Bid. Wasbin	Provinsi

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan program serta kegiatan SKPD. Ini menggambarkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan penyelenggaraan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah, yang secara operasional melaksanakan pemungutan pajak-pajak daerah dan beberapa obyek pendapatan lainnya, disamping mengkoordinasikan pengelolaan pendapatan daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam penyerapan dana yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan sebagai peningkatan kinerja aparatur, kelembagaan, pemenuhan pelayanan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi serta peningkatan kapasitas/kemampuan dalam pelaksanaan tugas operasional dilapangan.

Kedepan yang harus dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas pendataan terhadap obyek dan subyek pungutan, peningkatan efisiensi dan efektifitas sumber daya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program/kegiatan, pelaksanaan koordinasi/rekonsiliasi baik dengan Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat, serta peningkatan kemampuan dan keterampilan aparatur baik melalui bimbingan teknis dalam daerah maupun luar daerah.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan

lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu,

2022

Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
Pembina Tingkat. I
NIP. 19670727 198603 1 005